



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MUHAMMAD YUSUF
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 108835

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **930.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1450 m2/210 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 430.000.000
2. Tanah Seluas 695 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 4968 m2/60 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
4. Tanah Seluas 2704 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000
5. Tanah Seluas 424 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. Tanah Seluas 7408 m2 di KAB / KOTA SUMBAWA BARAT, HASIL SENDIRI Rp. 60.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **164.000.000**

1. MOTOR, YAMAHA SEPEDA MOTOR Tahun 2009, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000
2. MOBIL, TOYOTA FORTUNER Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 160.000.000
3. MOTOR, YAMAHA SPD MTR SL Tahun 2010, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **16.500.000**



D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.598.132.070
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.708.632.070
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.708.632.070

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.